

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sejak awal berdirinya adalah Negara Demokrasi. Kata demokrasi secara harafiah berasal dari kata Yunani yakni *demos* yang berarti *rakyat* dan *cratein* yang berarti *pemerintah*.

“ Pengertian demokrasi menurut pendapat Abraham Lincoln yang dikutip oleh Moedjanto secara sederhana menjelaskan bahwa demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat”.¹

Sejak didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia telah banyak diterbitkan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah, dimana rakyat melalui wakil-wakilnya sejak awal telah menentukan bahwa Negara Indonesia dibentuk oleh rakyat sebagai tempat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Hal tersebut juga telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen pasal 1 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa :

1. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
2. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.

Karena kedaulatan ada ditangan rakyat, maka rakyat membentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia

¹Moedjato G. dkk. *Pancasila Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 239.

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, maka salah satu upaya yang ditempuh oleh pemerintah adalah melalui dari pusat sampai ke daerah diseluruh pelosok tanah air.

Pembangunan itu dikenal dengan istilah pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk peningkatan kemampuan nasional yang sejajar dengan bangsa lain yang telah maju. Pembangunan dilaksanakan disemua aspek kehidupan yang meliputi aspek politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Namun sangat disayangkan, selama lebih dari lima puluh tahun Indonesia merdeka, pembangunan untuk kesejahteraan bangsa belum dapat diwujudkan sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Selama 32 tahun kekuasaan rezim orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto terkesan adanya kesenjangan pembangunan dipusat sampai daerah. Kekuasaan terlihat dari dominannya pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah hampir tidak memperhatikan masyarakat didaerahnya. Kontrol masyarakat yang lemah membuat banyaknya pejabat yang korupsi, kolusi dan nepotisme meluas kemana-mana. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat didaerah kurang berperan dalam melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan kekurangan-kekurangan dalam praktik dizaman orde baru, maka pada gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa, akhirnya berhasil